



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Desember 2023

Nomor	: 900.1.15.5/20741/Keuda	Yth	1. Gubernur Se-Indonesia
Sifat	: Sangat Segera		2. Bupati/Wali Kota
Lampiran	: 1 (Satu) berkas		Se-Indonesia
Hal	: Hasil Pemetaan dan	di -	
	Pemutakhiran Klasifikasi,	Tempat	
	Kodefikasi dan Nomenklatur		
	Perencanaan Pembangunan		
	dan Keuangan Daerah terkait		
	Pajak Daerah dan Retribusi		
	Daerah, DBH DR, DBH CHT,		
	DBH Sawit, DBH Migas Otsus		
	serta <i>TDF</i>		

Dalam rangka menindaklanjuti dinamika perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit), Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Otonomi Khusus (DBH Migas Otsus) serta *Treasury Deposit Facility (TDF)*, telah dilaksanakan inventarisasi dan/atau pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

A. Dasar Pemutakhiran

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 139/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil, Dana alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang

- Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-4021 Tahun 2021 tentang Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Surat Edaran Kemendagri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes; dan
  25. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 447/LB.030/E/11/2022 tentang Revisi Rincian SE 74/LB.030/E/01/2022.

#### B. Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran

1. Berpedoman pada dasar pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf A, Tim Pemutakhiran bersama Kementerian/Lembaga Teknis dan Kementerian Keuangan telah melakukan pembahasan atas inventarisasi dan/atau pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta *TDF*.
2. Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui penambahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan dan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan menyandingkan metadata kinerja, indikator dan satuan

pada rincian kegiatan DBH DR, DBH CHT dan DBH Sawit dengan metadata kinerja, indikator dan satuan pada sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun defisini metadata, indikator, dan satuan sebagai berikut:

- a. Metadata adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi/penyelenggaraan rincian kegiatan DBH DR, DBH CHT dan DBH Sawit dan/atau sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
  - b. Kinerja adalah hasil yang berupa keluaran atau sub output dari pelaksanaan rincian kegiatan DBH DR, DBH CHT dan DBH Sawit dan/atau sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
  - c. Indikator adalah alat ukur dari hasil pelaksanaan rincian kegiatan DBH DR, DBH CHT dan DBH Sawit dan/atau sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
  - d. Satuan adalah dasar ukuran dari indikator.
4. Metadata kinerja, indikator dan satuan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pada pelaksanaan DBH Sawit TA 2023 dilakukan melalui penyesuaian satuan dan target sub kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, penyesuaian satuan dan target sub kegiatan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.
  5. Metadata kinerja, indikator dan satuan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pada pelaksanaan DBH DR TA 2024, DBH



penyesuaian satuan dan target sub kegiatan pada saat Perubahan RKPD Tahun 2024.

6. Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimutakhirkan dalam *database* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
7. Berkenaan ketentuan tersebut diatas, terlampir disampaikan Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta *TDF*.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi pedoman dan disampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Pih. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,



Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
16. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
17. Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan; dan
18. Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

:  
: 900.1.15.5/20741/Keuda  
: 15 Desember 2023

I. PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. DBH CHT-PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
A	Bidang Kesejahteraan Masyarakat						
1	Program Peningkatan Kualitas						
	a.	Pelatihan peningkatan kualitas tembakau					
		1) Pelatihan budidaya tembakau	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
		2) Pengembangan Pola Kemitraan	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit
			3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok

NO	<b>BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN</b> <b>PMK 215/PMK.07/2021</b>		KODE	<b>KEPMENDAGRI NOMOR</b> <b>900.1.15.5-1317 TAHUN 2023</b>	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		3) Pelatihan pascapanen	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
		4) Pelatihan Penerapan PHT dan Pengendalian OPT	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
		5) Manajemen Agribisnis	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit
			3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit
		6) Pelatihan penentuan grade/tingkatan kualitas bahan baku tembakau	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok



NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		7) Pembuatan pupuk organik	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
		8) Pelatihan penguatan kelembagaan petani	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
	b.	Penanganan panen dan pasca panen					
		1) Pengadaan perlengkapan dan peralatan jamur	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
			3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
		2) Pengadaan rumah fermentasi	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
		3) Pembangunan rehabilitasi rumah pengeringan tembakau (omprongan, Asepan) dan sarana pendukungnya	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
			3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
		4) Pembangunan/rehabilitasi gudang penyimpanan kelompok tani	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
			3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebuna	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
		5) Pengadaan alat perajang dan alat pendukungnya	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
		6) Penggunaan bahan bakar alternatif non subsidi yang ramah lingkungan dan terbarukan	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
	c.	Penerapan inovasi teknis					
		1) Pengembangan Diversifikasi produk tembakau (non tobacco)	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
		2) Pengembangan varietas tembakau	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
		3) Fasilitasi pelepasan varietas tembakau	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
			3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan
		4) Penguatan/Penguatan Laboratorium dan sarana laboratorium	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit



NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		5) Fasilitasi pengujian kadar nikotin tembakau varietas baru	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
			3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
		6) Pengembangan Metode Pengujian Kadar Nikotin Tembakau	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
			3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
		7) Pengembangan tembakau varietas unggul baru ( <i>Oriental, Burley dan Virginia</i> )	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
			3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
		8) Fasilitasi Indikasi Geografis	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB
		9) Fasilitasi Demplot Pemupukan Yang Berimbang	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
		10) Pemurnian varietas tembakau yang sudah dilepas	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat
			3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
			3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan
		11) Fasilitasi persiapan rencana implementasi asuransi tembakau	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
	d.	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau					
		1) Bantuan Benih Unggul	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
			3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
		2) Bantuan Pupuk	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan



NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		3) Bantuan Pestisida	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
		4) Bantuan Tenaga Kerja	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
		5) Pembentukan UPPO (Bangunan, Alat, Ternak, Kandang Ternak dan Bak Fermentasi)	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
		6) Pengadaan alat pengolah tanah	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
		7) Pengadaan handtraktor	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
		8) Pengadaan cultivator	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		9) Pengadaan alat angkut saprodi dan produksi hasil tembakau (Misalnya : Kendaraan Roda 3	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
		10) Pembuatan sumur dangkal dan sumur dalam	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
		11) Pengadaan pompa air dan sarana pendukungnya	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
		12) Pengadaan <i>mist blower, power sprayer, hand sprayer</i>	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
		13) Pengadaan <i>shading net, kerodong, plastik UV dan pot tray</i> untuk pembenihan	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		14) Pembuatan <i>green house</i>	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
		15) Pengadaan <i>mini tiller</i> (alat penyanggulma)	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasnya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
		16) Pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan jalan produksi yang dapat dilalui kendaraan roda empat	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen
		17) Pembangunan embung dan sarana sumber air	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan pendukung pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
		18) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sarana irigasi (tertier, kuarter)	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		19) Bantuan bibit/benih/pupuk. Sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
			3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha
			3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
<b>2</b>	<b>Program Pembinaan Industri</b>						
	a.	Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen
	b.	Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen



NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	c.	Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen
	d.	Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah	3.31.02.1.01.0005	Koodinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
	e.	Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau	3.31.02.1.01.0005	Koodinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
	f.	Penyediaan/ pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM
			1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan
			1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM
			1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM
			1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan
			1.03.10.1.01.0034	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terbangunnya Terowongan/Tunnel	Jumlah Terowongan/Tunnel yang Dibangun	Terowongan /Tunnel
			1.03.10.1.01.0037	Pembangunan Underpass	Terbangunnya Underpass	Jumlah Underpass yang Dibangun	Underpass
			1.03.10.1.01.0039	Pembangunan Flyover	Terbangunnya Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	Flyover
			3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial						
	a.	Pemberian bantuan					
	(i)	Pemberian BLT	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga
	(ii)	Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau	3.27.05.1.01.0002	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura, dan perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	HA

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
	b.	Peningkatan keterampilan kerja					
	(i)	Pelatihan keterampilan kerja	2.07.03.1.01.0001	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang
			3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
			3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
			3.31.02.1.01.0005	Koodinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
	(ii)	Bantuan modal usaha	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, sinkronisasi dan dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
			1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang
	(iii)	Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarpras produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan
			3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen perkebunan	Laporan



NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
<b>B</b>	<b>Bidang Penegakan Hukum</b>						
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan Industri</b>						
	a.	Pembangunan KIHT	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
	b.	Pengelolaan KIHT	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
	c.	Pengembangan KIHT	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
<b>2</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>						

NO	<b>BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN</b> <b>PMK 215/PMK.07/2021</b>		KODE	<b>KEPMENDAGRI NOMOR</b> <b>900.1.15.5-1317 TAHUN 2023</b>	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	a.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
	b.	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen
<b>3</b>	<b>Program Pemberantasan BKC Ilegal</b>						
	a.	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan
	b.	Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	c.	Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan
<b>C</b>	<b>Program Kesehatan</b>						
<b>1</b>	<b>Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif, Preventif, maupun Kuratif/ Rehabilitatif dengan Prioritas Mendukung Upaya Penurunan</b>						
	a.	Penurunan angka prevalansi stunting	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
			1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
			1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen
			1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen
			1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	b	Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
	c.	Peningkatan vaksinasi dan imunisasi	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen
			1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket
	d.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dibawah lima;	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen
	e.	Penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen
2	Penyediaan/Peningkatan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan						
	a.	Pengadaan	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
	b.	Pembangunan baru;	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			1.02.02.1.01.0002	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit
	c.	Penambahan ruangan	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
			1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit
	d.	Rehabilitasi ruangan	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit



NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit
	e.	Pemeliharaan bangunan/ perlataan	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit
			1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit
			1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	f.	Kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau	1.02.02.101.0013	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
			1.02.02.1.04.0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Unit
	g.	Pembelian suku cadang	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas, layanan kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
			1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i> yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
			1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
			1.02.02.1.01.0016	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit
	h.	Alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan					
		Bangunan/gedung/ruang;	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021		KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		Alat kesehatan;	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
		Obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket
		Sarana transportasi rujukan; dan/atau	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
		Peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun	1.02.2.1.01.0016	Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit	Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit

NO	BIDANG, PROGRAM, DAN KEGIATAN PMK 215/PMK.07/2021	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	kuratif/rehabilitatif.	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit
3	Penyediaan/Peningkatan Sarana/Prasarana Fasilitas Sanitasi, Pengelolaan Limbah, dan Air Bersih	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
		1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
4	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen



3. DBH DR-PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya	DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk rnembiayai kegiatan yang meliputi:							
		a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen
		b. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen
		c. Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:							
		1). Pembangunan Hutan Hak;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		2). Penghijauan lingkungan;	Ha		3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		3). Pembangunan Hutan kota;	Ha		3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		4). Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut.	Ha		3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
					3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Bangunan Sipil Teknis	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit
					3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha
		d. Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi lahan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
		e. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 dan PP.26 Tahun 2020	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
2	Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai	a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	kewenangannya	1). Penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen
		2). Budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU.23 tentang Pemerintah Daerah);	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen
		3). Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2).	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
		b. Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi:							
		1). Penanaman mangrove dan hutan pantai diluar kawasan	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha
		2. Penanaman oleh pemegang izin Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial.	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		c. Rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas:							
		1). Penghijauan;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		2). Reboisasi;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		3). Pemeliharaan tanaman;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
		4). Pengayaan tanaman;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha
		5). Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Bangunan Sipil Teknis	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit
		6). Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen
		7). Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
3	Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)			3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan		1. Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Tersedianya Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen
			2. Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan
			3. Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura	Unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen
		b.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terselaksananya Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen
		c.	Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
		d.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Skala dan hun Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen
		e.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pemanfaatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
						3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terselaksananya Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		f.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terselaksananya Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen
		g.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen
		h.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Manajemen
		i.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terpenuhinya Hak Akses SI- RPBBPHH bagi PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Manajemen
		j.	Pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Manajemen
		k.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitas Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
		l.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terselaksananya Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen
		m.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
		n.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan BPBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		o. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik							
		1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi	Entitas	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan
		2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetik	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha
		3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
		4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
		5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliring)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
		6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati	Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
		7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang
		8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial :							
		a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat		1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang
		b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan		1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha
		c) Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan		1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati			1. Pemerintah 2. Masyarakat	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
		e) Pemulihan Ekosistem/ Pembinaan Habitat			1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	a.	Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat					
		1)	Operasional POKJA PPS	Jumlah Kegiatan	POKJA PPS Provinsi	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		2)	Sosialisasi tingkat tapak	Jumlah Lokasi	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		3)	Fasilitasi Usulan Izin PS	Jumlah Calon Lokasi PS	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		4)	Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		5)	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/atau	Jumlah Komunitas MHA	Komunitas MHA	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		6)	Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal	Dokumen	Komunitas MHA dan Pengampu kearifan lokal	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		b.	Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)							
		1)	Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah Dokumen	KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		2)	Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha	Jumlah KUPS	KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		3)	Pelatihan pengembangan kewirausahaan	Jumlah KUPS	KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		4)	Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial	Jumlah KUPS	KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		5)	Pembangunan agroforestry	Jumlah KUPS	KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		6)	Pemberian bantuan alat ekonomi produktif	Paket	KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial							
		a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan	Unit	Pemerintah & KUPS	X.XX.01.1.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemilihan sub kegiatan dalam kegiatan di atas, disesuaikan dengan indikator dan target capaiannya)			
		b) Operasional Pendamping	Jumlah Pendamping	KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		8) Pengawasan dan Pengendalian PS							
		a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS	Kegiatan	Pemerintah & KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		b) Sarpras pendukung pelaksanaan Monev	Unit	Pemerintah & KUPS	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		c. Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Kemitraan Konservasi (Hektar)							
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kemitraan Konservasi	Hektar	Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan	Desa/Kelompok	Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		3) Perjanjian Kerja Sama	Perjanjian	Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		4) Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		d Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi							
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Desa/Kelompok	Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		2) Pembentukan Kelembagaan	Kelompok	Masyarakat	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
		3) Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		4) Pemberian Bantuan Usaha	Unit	Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
5	Operasionalisasi	a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	Kesatuan Pengelolaan Hutan	1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan:		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi					
		a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif.	Lokasi	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tercegahnya kerusakan hutan	Luas Hutan Yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha
		b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM).	Lembaga	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery):	Kegiatan	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi					
		a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutsos.		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Yang Disiapkan Untuk Perhutanan Sosial	Ha
		b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH.		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Yang Disiapkan Untuk Perhutanan Sosial	Ha
		c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Yang Disiapkan Untuk Perhutanan Sosial	Ha
		3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi					
		a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Orang	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		b) Operasional KPH	Bulan	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersedianya Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNPB dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNPB (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha.	Kegiatan	Dinas yang membidangi LHK di 33 Pemerintah Provinsi	3.28.03.1.06.0004	Pengawasan perijinan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Terpenuhinya Hak Akses SI-RPBBPHH bagi BPBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Manajemen BPBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Manajemen
		b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:							
		Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:		Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi					
		1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
		2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Sylvopastura maupun Silvofishery).	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
					3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan).	Lembaga	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:		UMKM/ Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi					
		1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan sklala kecil/UMKM.	Lambaga	UMKM/ Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
		2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM.	Kegiatan	UMKM/ Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		d Penyusunan RPHJP dan RPHJPd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJPd yang sudah disahkan)	Jumlah Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen
					3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit
					3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		e. Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan	Laporan Pengamanan Hutan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
					3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		f.	Penyusunan data potensi SDH	Data Potensi SDH	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen
						3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen
		g.	Penataan batas blok dan petak (penantaan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit
		h.	Monev Pemanfaatan Hutan	Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen
						3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
		i.	Monev Penggunaan kawasan hutan	Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.08.0002	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan KHDTK	Dokumen
						3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen
						3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
		j.	Penyusunan rencana detail pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak	Rencana Bisnis, Desain Tapak	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		k.	Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan	Sarpras Perkantoran dan Sarpras Teknis Lapangan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X.XX.01.1.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemilihan sub kegiatan dalam kegiatan di atas, disesuaikan dengan indikator dan target capaiannya)			
		l.	Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen
		m.	Pembangunan resort	Jumlah Resort	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersedianya Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit
		n.	Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
		o.	Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
		p.	Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen
						3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
		q.	Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
						3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
						3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		r. Fasilitas ketahanan pangan ( <i>food estate</i> ) dan energi yang dilaksanakan KPH	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
6	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran)	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga	Unit/Buku	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya	Unit/Lembar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu	Unit/Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		e. Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Lokasi/Kelompok	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kg/Ton/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		i. Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Desa	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla	Unit						
		1) Kendaraan roda 4 khusus dalkarhutla	Unit		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit
					X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
		2) Kendaraan roda 2 khusus dalkarhutla	Unit		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit
					X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		3) Kendaraan/transportasi air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit
					X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
		4) Pompa Jingjing	Unit		X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
		5) Pompa Induk	Unit		X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
		6) Pompa Apung	Unit		X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
		7) Selang	Unit		X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit
					X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		8) Nozzle	Unit		X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit
					X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		9) Peralatan tangan	Unit		X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit
					X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		10) Pompa Punggung	Unit		X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit
					X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		11) Peralatan Pribadi (APD)	Unit		X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit
					X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		12) Perlengkapan Regu	Unit		X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit
					X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit

NO	PROGRAM		KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
		o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	
						1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPenyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	
		p.	Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Dokumen	
						1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	
		q.	Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan		Pemerintah	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	
			1) Pengawasan areal bekas terbakar	Lokasi/Hektar							
			2) Inventarisasi luas karhutla	Lokasi/Hektar							
			3) Penaksiran kerugian	Lokasi/Hektar							
			4) Koordinasi penanganan pasca karhutla	Kegiatan/lokasi							
		r.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)		1. Pemerintah 2. Masyarakat						
			1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Orang		3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	
			2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api	Hektar/Spot		3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi	
			3) Pemadaman Kebakaran Hutan	Hektar		3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	
			4) Penyadartahuan Masyarakat	Desa/Kelompok		3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit		X.XX.01.1.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		t. Pendirian posko Karhutla	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
7	Perlindungan dan pengamanan hutan	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang dilakukan patroli pencegahan dan kerusakan	Ha
		b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha
		c. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi
		d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		e. Penjagaan di tempat-tempat tertentu	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		f. Patroli pengamanan	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi							
		g. 1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi	Jumlah Operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi illegal.	Jumlah Operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan : Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi	Kegiatan	Pemerintah	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		i. Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan	Kegiatan	Polisi Kehutanan	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		j.	Penyegaran/Pembinaan PPNS	Kegiatan	PPNS	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		k.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan : Apel Siaga Pengamanan Hutan	Kegiatan	Pemerintah	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		l.	Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, Senjata Api dan Mobil Patroli)	Polisi Kehutanan	Polisi Kehutanan	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
						X.XX.01.1.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemilihan sub kegiatan dalam kegiatan di atas, disesuaikan dengan indikator dan target capaiannya)			
		m.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)		1. Pemerintah 2. Masyarakat					
			1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	Orang		3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa
			2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	Kegiatan		3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi
			3) Penyediaan Sapras Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Unit		3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi
						X.XX.01.1.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemilihan sub kegiatan dalam kegiatan di atas, disesuaikan dengan indikator dan target capaiannya)			
8	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	a.	Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi,							
			1) Pembuatan batas areal sumber benih;			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi);	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
			3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouguing));			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
			4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk dan pemangkasan pucuk ( <i>top prunning</i> ))			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
			5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan);			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha



NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, pengembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
			7) Pemanfaatan/pengunduhan benih.			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
		b.	Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas), melalui:							
			1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas;			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
			2) Pengumpulan benih dari individu/ family plus;			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
			3) Pembuatan rancangan penanaman;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
			4) Pembibitan;			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
			5) Pemapangan			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
			6) Penanaman dan pemeliharaan;			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		7) Evaluasi tegakan;			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
		8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouguing)) ; dan/atau			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
		9) Penetapan sumber benih.			3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		c. Pembuatan/pengadaan bibit:							
		1) Pembangunan persemaian;	Unit atau Batang	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
		2) Pengadaan bibit (tender);	Unit atau Batang		3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
		3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau	Unit atau Batang		3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Serta Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha
		4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).			3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersedianya Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit
		d. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi:		1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH					
		1) Sertifikasi sumber benih;	Kali		3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
		2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau	Kali		3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
		3) Sertifikasi mutu bibit.	Kali		3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		e. Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa:		1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Pelaku Usaha PTH					
		1) Bimbingan teknis;	Kali atau Orang		3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
		2) Pemantauan dan evaluasi;	Kali atau Orang		3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
		3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau	Kali atau Orang		3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
		4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui:	Kali atau Orang						
		a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih;	Kali atau Orang		3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih;	Kali atau Orang		3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ;	Kali atau Orang		3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		d)	Pelatihan Penilaian Mutu Bibit;	Kali atau Orang		3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		e)	Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit	Kali atau Orang		3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
9	Penyuluhan kehutanan	a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan : Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)	Jumlah Lokasi	Lokasi UPPK	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		b.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Fasilitasi Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posluhutdes)	Jumlah Lokasi	1. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 2. KTH 3. Masyarakat	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
		c.	Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan:	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat					
			1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan;			3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
			2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan;			3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
			3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau			3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
			4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan.			3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
			5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh			3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		d.	Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL	Kelompok	KTH	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
		e.	Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH			3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok

NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		f.	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh	Unit	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
						3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		g.	Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk: 1) Metode penyuluhan: a) Lomba wana lestari; b) Termu teknis KTH; c) Sekolah lapang; dan/atau d) Workshop, dll. 2) Materi Penyuluhan: a) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau b) Media elektronik (radio, TV dan online sistem) c) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/ HHBK/ Perhutanan Sosial/ pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)	Jumlah Lokasi	1. KTH 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		h.	Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi: 1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau 2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan.	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat					
						3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
						3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		i.	Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		j.	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot		1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang



NO	PROGRAM	KEGIATAN		OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		k.	Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat					
			1) Sarana perlengkapan perorangan;			X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemilihan sub kegiatan dalam kegiatan di atas, disesuaikan dengan indikator dan target capaiannya)			
			2) Sarana dan prasarana pendukung utama; dan/atau			X.XX.01.1.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemilihan sub kegiatan dalam kegiatan di atas, disesuaikan dengan indikator dan target capaiannya)			
			3) Sarana pendukung lainnya.			X.XX.01.1.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemilihan sub kegiatan dalam kegiatan di atas, disesuaikan dengan indikator dan target capaiannya)			
		l.	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
		m.	Pendampingan Kegiatan RHL	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
10	Program strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah	a.	Pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat, Meliputi							
			1) Masyarakat disekita hutan; dan/atau	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terperennanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga
			2) Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah	Orang						
		b.	Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi:							
			1) Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	UMKM	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODE	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		2) Dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		4) Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang
		5) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
		6) Pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata ProvinsiTer	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang Sah dan Legal ditetapkan kepala daerah	Dokumen
		c. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen
					5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
		d. Penyusunan RKP DBH DR Provinsi	Dokumen	Pemerintah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
					X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen

## 5 . DBH SAWIT- BIDANG PERTANIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR
1.	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	1. Kegiatan Utama			<b>PROVINSI</b> a. 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan pengembangan prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian b. 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya c. 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian d. 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian e. 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani
		a. Sosialisasi Kegiatan di tingkat pekebun	Pertemuan	Laporan	
		b. Peningkatan kapasitas tim pendataan	Bimbingan Teknis	Orang	
		c. Pendataan pekebun	Sensus	Orang	
		d. Verifikasi dan validasi data pekebun	Pertemuan	Laporan	
		e. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan	Survey	Persil	
		f. Penerbitan STDB	Penerbitan Surat	Dokumen	
		2. Kegiatan Penunjang			
		a. Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, bimbingan teknis, pendataan, dan verifikasi	Perjalanan	Laporan	
		b. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka bimbingan teknis	Honor	Laporan	
		c. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka verifikasi dan validasi data	Honor	Laporan	
		d. Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pemetaan dan pengolahan data	Sewa Alat	Unit	
		1) GPS Hand Held	Sewa Alat	Unit	

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN		OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR
			2) Laptop dilengkapi aplikasi pemetaan (arccgis)	Sewa Alat	Unit	
			3) Kendaraan untuk survey lapangan	Sewa Alat	Unit	
			4) ATK	Belanja Bahan	Paket	
			5) Printer	Sewa Alat	Unit	
			6) Ruangan pertemuan	Sewa Alat	Unit	
2.	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	1.	Kegiatan Utama			<b>PROVINSI</b> a. 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan pengembangan prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian  b. 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya  c. 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian
			a. Pembentukan tim penyusun	Pertemuan	Laporan	
			b. Identifikasi dan pendataan program dan kegiatan	Pertemuan	Laporan	
			c. Perumusan rencana aksi	Pertemuan	Laporan	
			d. Konsultasi/Uji publik	Pertemuan	Laporan	
			e. Penetapan rencana aksi	Pertemuan	Laporan	
		2.	Kegiatan Penunjang			
			a. Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan tim, identifikasi dan pendataan program, perumusan rencana aksi, konsultasi publik, dan penetapan rencana aksi	Perjalanan Dinas	Laporan	
			b. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka konsultasi/uji publik	Honor	Laporan	
			c. Penyediaan sarana pengolahan data program kegiatan	Sewa Alat	Unit	
			1) Laptop	Sewa Alat	Unit	
			2) Printer	Sewa Alat	Unit	

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN		OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR
3.	Pembinaan Dan Pendampingan Untuk Sertifikasi <i>Internal Control System</i> (ISPO) Pekebun	1.	Kegiatan Utama			<b>PROVINSI</b> a. 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya b. 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian c. 3.27.03.1.01.0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan d. 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian e. 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani
			a. Pendataan pekebun untuk proses sertifikasi ISPO	Survey	Data Pekebun	
			b. Sosialisasi sertifikasi ISPO	Sosialisasi	Orang	
			c. Pelatihan sertifikasi ISPO	Pelatihan	Orang	
			d. Pendampingan Pekebun untuk Sertifikasi ISPO	Bimbingan Teknis	Laporan	
			1) Pembentukan tim kendali internal	Pertemuan	Laporan	
			2) Penyusunan prosedur/mechanisme terkait pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	Pertemuan	Dokumen	
			3) Sosialisasi prosedur/mechanisme kepada anggota kelembagaan	Pertemuan	Laporan	
			4) Pengelolaan catatan terkait aktivitas pekebun dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO termasuk pengelolaan catatan kelompok tani/koperasi	Pertemuan	Laporan	

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN		OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR		
			5) Penyusunan dokumen pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO pekebun	Pertemuan	Dokumen			
			6) Pelatihan Teknik audit kepada tim kendali internal	Pelatihan	Orang			
			7) Penjadwalan kegiatan audit internal dan pelaksanaan audit internal	Pertemuan	Laporan			
			8) Perbaikan temuan atau ketidaksesuain pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	Pertemuan	Laporan			
			9) Penjadwalan audit eksternal	Pertemuan	Laporan			
		2.	Kegiatan Penunjang					
		a.	Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka pelatihan sertifikasi ISPO	Honor	Laporan			
		b.	Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pekebun	Perjalanan Dinas	Laporan			
		c.	Penyediaan sarana pendukung pengolah data sertifikasi ISPO	Sewa Alat	Unit			
			1) Kendaraan operasional lapangan	Sewa Alat	Unit			
			2) Laptop	Sewa Alat	Unit			
			3) Printer	Sewa Alat	Unit			

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN		OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR
			4) Infocus	Sewa Alat	Unit	
			5) ATK	Sewa Alat	Unit	
			6) Ruang pertemuan	Sewa Alat	Unit	



6 . DBH SAWIT- BIDANG PERTANIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR
1.	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	1. Kegiatan Utama			<b>KABUPATEN/KOTA</b> a. 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya b. 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian c. 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
		a. Sosialisasi Kegiatan di tingkat pekebun	Pertemuan	Laporan	
		b. Peningkatan kapasitas tim pendataan	Bimbingan Teknis	Orang	
		c. Pendataan pekebun	Sensus	Orang	
		d. Verifikasi dan validasi data pekebun	Pertemuan	Laporan	
		e. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan	Survey	Persil	
		f. Penerbitan STDB	Penerbitan Surat	Dokumen	
		2. Kegiatan Penunjang			
		a. Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, bimbingan teknis, pendataan, dan verifikasi	Perjalanan	Laporan	
		b. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka bimbingan teknis	Honor	Laporan	
		c. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka verifikasi dan validasi data	Honor	Laporan	
		d. Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pemetaan dan pengolah data	Sewa Alat	Unit	
		1) <i>GPS Hand Held</i>	Sewa Alat	Unit	
		2) Laptop dilengkapi aplikasi pemetaan (arccgis)	Sewa Alat	Unit	

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN		OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR
			3) Kendaraan untuk survey lapangan	Sewa Alat	Unit	
			4) ATK	Belanja bahan	Paket	
			5) Printer	Sewa Alat	Unit	
			6) Ruangan pertemuan	Sewa Alat	Unit	
2.	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	1.	Kegiatan Utama			<b>KABUPATEN/KOTA</b> a. 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya b. 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian c. 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Kawasan Pertanian
			a. Pembentukan tim penyusun	Pertemuan	Laporan	
			b. Identifikasi dan pendataan program dan kegiatan	Pertemuan	Laporan	
			c. Perumusan rencana aksi	Pertemuan	Laporan	
			d. Konsultasi/Uji publik	Pertemuan	Laporan	
			e. Penetapan rencana aksi	Pertemuan	Laporan	
		2.	Kegiatan Penunjang			
			a. Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan tim, identifikasi dan pendataan program, perumusan rencana aksi, konsultasi publik, dan penetapan rencana aksi	Perjalanan Dinas	Laporan	
			b. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka konsultasi/uji publik	Honor	Laporan	
			c. Penyediaan sarana pengolahan data program kegiatan	Sewa Alat	Unit	
			1) Laptop	Sewa Alat	Unit	
			2) Printer	Sewa Alat	Unit	

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR
3.	Pembinaan Dan Pendampingan Untuk Sertifikasi <i>Internal Control System</i> (ISPO) Pekebun	1. Kegiatan Utama <div> <div>a. Pendataan pekebun untuk proses sertifikasi ISPO</div> <div>b. Sosialisasi sertifikasi ISPO</div> <div>c. Pelatihan sertifikasi ISPO</div> <div>d. Pendampingan Pekebun untuk Sertifikasi ISPO</div> <div>1) Pembentukan tim kendali internal</div> <div>2) Penyusunan prosedur/mekanisme terkait pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO</div> <div>3) Sosialisasi prosedur/mekanisme kepada anggota kelembagaan</div> <div>4) Pengelolaan catatan terkait aktivitas pekebun dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO termasuk pengelolaan catatan kelompok tani/koperasi</div> <div>5) Penyusunan dokumen pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO pekebun</div> </div>	<div>Survey</div> <div>Sosialisasi</div> <div>Pelatihan</div> <div>Bimbingan Teknis</div> <div>Pertemuan</div> <div>Pertemuan</div> <div>Pertemuan</div> <div>Pertemuan</div> <div>Pertemuan</div>	<div>Data Pekebun</div> <div>Orang</div> <div>Orang</div> <div>Laporan</div> <div>Laporan</div> <div>Dokumen</div> <div>Laporan</div> <div>Laporan</div> <div>Dokumen</div>	<b>KABUPATEN/KOTA</b> <div> a. 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya b. 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian c. 3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan d. 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian </div>

NO.	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN		OUTPUT	SATUAN OUTPUT	KLASIFIKASI KODEFIKASI NOMENKLATUR		
			6) Pelatihan Teknik audit kepada tim kendali internal	Pelatihan	Orang			
			7) Penjadwalan kegiatan audit internal dan pelaksanaan audit internal	Pertemuan	Laporan			
			8) Perbaikan temuan atau ketidaksesuain pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	Pertemuan	Laporan			
			9) Penjadwalan audit eksternal	Pertemuan	Laporan			
		2.	Kegiatan Penunjang					
		a.	Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka pelatihan sertifikasi ISPO	Honor	Laporan			
		b.	Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pekebun	Perjalanan Dinas	Laporan			
		c.	Penyediaan sarana pendukung pengolah data sertifikasi ISPO	Sewa Alat	Unit			
		1)	Kendaraan operasional lapangan	Sewa Alat	Unit			
		2)	Laptop	Sewa Alat	Unit			
		3)	Printer	Sewa Alat	Unit			
		4)	Infocus	Sewa Alat	Unit			
		5)	ATK	Sewa Alat	Unit			
		6)	Ruang pertemuan	Sewa Alat	Unit			

7. DBH SAWIT- BIDANG KEHUTANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan/Kode		Output	Satuan Output	Penerima Manfaat
4	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	A	Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi)			
			1 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Kode: 3.28.03.1.04.01	Dokumen Perencanaan	Unit	Pemerintah
			2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Kode: 3.28.03.1.04.02	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat
			3 Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara Kode: 3.28.03.1.04.03	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat
			4 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Kode: 3.28.03.1.04.04	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat
			5 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kode: 3.28.03.1.04.07	Luas Penerapan Pengembangan Teknologi RHL	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat
			6 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Kode: 3.28.03.1.04.08	Laporan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	Pemerintah
			7 Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan Kode: 3.28.03.1.04.09	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat
			8 Pembangunan gully plug Kode: 3.28.03.1.04.05	Bangunan KTA	Unit	Pemerintah dan Masyarakat
			9 Pembangunan Dam Penahan Kode: 3.28.03.1.04.10	Bangunan KTA	Unit	Pemerintah dan Masyarakat
			10 Pembangunan Sumur resapan Kode: 3.28.03.1.04.11	Bangunan KTA	Unit	Pemerintah dan Masyarakat
			11 Pemeliharaan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2 Kode: 3.28.03.1.04.12	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat
		B	Perbenihan Tanaman Hutan (Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi)			
			1 Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan Kode: 3.28.03.1.09.01	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat
			2 Sertifikasi Sumber Benih	Rihit tanaman	Batang	Pemerintah dan

			Kode: 3.28.03.1.09.02	Bibit tanaman	Batang	Masyarakat
		3	Sertifikasi Mutu Benih Kode: 3.28.03.1.09.03	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat
		4	Sertifikasi Mutu Bibit Kode: 3.28.03.1.09.04	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat
		5	Pengawasan Peredaran Benih Dan/Atau Bibit Kode: 3.28.03.1.09.05	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat
		6	Pembangunan Sumber Benih Kode: 3.28.03.1.09.06	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat
		7	Pengelolaan Sumber Benih Kode: 3.28.03.1.09.07	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat
		8	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan Kode: 3.28.03.1.09.08	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat
		9	Pembuatan Dan Pengadaan Bibit Untuk Rehabilitasi Lahan Kode: 3.28.03.1.09.09	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat
		<b>C</b>	<b>Pemulihan Lingkungan (Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota)</b>			
		1	Kegiatan Penghijauan Lingkungan Kode: 2.11.04.2.01.0004	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat
		2	Pembangunan Hutan Kota Kode: 2.11.04.2.01.0004	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat
		3	Perlindungan Mata Air, Kanan Kiri Sungai, Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Kode : 1.03.02.2.01.0076 1.03.02.2.01.0073 1.03.02.2.01.0079 1.03.02.2.01.0086 1.03.02.2.01.0088 1.03.02.2.01.0089 1.03.02.2.01.0093 2.11.03.2.03.0007 2.11.03.2.03.0009 2.11.03.2.03.0010 2.11.03.2.03.0013	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah dan Masyarakat

8. DBH SAWIT- BIDANG KEHUTANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

SE KLHK						KEPMENDAGRI 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023					
No	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Output	Satuan Output	Penerima Manfaat	Kode	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Keterangan
4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	C. Pemulihan Lingkungan (dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota)									
		1. Kegiatan Penghijauan Lingkungan	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah & Masyarakat	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	
		2. Pembangunan Hutan Kota	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah & Masyarakat	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	
		3. Perlindungan mata air, kanan kiri sungai, Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau	Tutupan Lahan	Hektar	Pemerintah & Masyarakat	1.03.02.2.01.0076	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Beroperasi dan Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Untuk kegiatan dan sub kegiatan di <b>urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (program pengelolaan SDA)</b> , antara lain terkait pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, serta operasi dan pemeliharaan untuk mata air, danau, dan sungai, hanya berkaitan dengan infrastrukturnya saja (infrastruktur pada mata air, infrastruktur pada sungai, dan infrastruktur pada danau seperti tembok, tanggul, dinding dan sebagainya)
						1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	
						1.03.02.2.01.0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Beroperasi dan Terpeliharanya Danau	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	Danau	
						1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	Danau	
						1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit	
						1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	
						1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	
						2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	
						2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	
						2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi	kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	
						2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	



II. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR KEUANGAN DAERAH

1. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR REKENING-SUMBER DANA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	01	17			Pajak Alat Berat
1	1	01	18			Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
1	1	01	19			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
1	1	01	20			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	01	21			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
1	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
1	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil
2	2	01	01	01	0014	DBH Sawit
2	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
2	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
2	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
2	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh

2. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR REKENING-NERACA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	5	08				Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)
1	5	08	01			Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)
1	5	08	01	01		Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)
1	5	08	01	01	0001	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)
1	5	08	01	02		Dana Alokasi Umum <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)
1	5	08	01	02	0002	Dana Alokasi Umum <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)

3. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR REKENING-PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	01	15		PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	01	01	15	0001	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi
4	1	01	01	15	0002	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum
4	1	01	01	15	0003	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pusat
4	1	01	01	15	0004	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah
4	1	01	01	16		PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	01	01	16	0001	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi
4	1	01	01	16	0002	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum
4	1	01	01	16	0003	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pusat
4	1	01	01	16	0004	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah
4	1	01	01	17		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	01	01	17	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi
4	1	01	01	17	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum
4	1	01	01	17	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pusat
4	1	01	01	17	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Daerah
4	1	01	01	18		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	01	01	18	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi
4	1	01	01	18	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum
4	1	01	01	18	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat
4	1	01	01	18	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah
4	1	01	02	15		BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	01	02	15	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
4	1	01	02	16		BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	01	02	16	0001	BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
4	1	01	02	17		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	01	02	17	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
4	1	01	02	18		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	01	02	18	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
4	1	01	14	38		Pajak Belerang
4	1	01	14	38	0001	Pajak Belerang
4	1	01	14	39		Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
4	1	01	14	39	0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
4	1	01	17			Pajak Alat Berat
4	1	01	17	01		Pajak Alat Berat
4	1	01	17	01	0001	Pajak Alat Berat
4	1	01	18			Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
4	1	01	18	01		Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
4	1	01	18	01	0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	01	19			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4	1	01	19	01		PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4	1	01	19	01	0001	PBJT-Restoran
4	1	01	19	01	0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
4	1	01	19	02		PBJT-Tenaga Listrik
4	1	01	19	02	0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
4	1	01	19	02	0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
4	1	01	19	03		PBJT-Jasa Perhotelan
4	1	01	19	03	0001	PBJT-Hotel
4	1	01	19	03	0002	PBJT-Hostel
4	1	01	19	03	0003	PBJT-Vila
4	1	01	19	03	0004	PBJT-Pondok Wisata
4	1	01	19	03	0005	PBJT-Motel
4	1	01	19	03	0006	PBJT-Losmen
4	1	01	19	03	0007	PBJT-Wisma Pariwisata
4	1	01	19	03	0008	PBJT-Pesanggarahan
4	1	01	19	03	0009	PBJT-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/Resort/ <i>Cottage</i>
4	1	01	19	03	0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
4	1	01	19	03	0011	PBJT-Glamping
4	1	01	19	04		PBJT-Jasa Parkir
4	1	01	19	04	0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
4	1	01	19	04	0002	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )
4	1	01	19	05		PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
4	1	01	19	05	0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
4	1	01	19	05	0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
4	1	01	19	05	0003	PBJT-Kontes Kecantikan
4	1	01	19	05	0004	PBJT-Kontes Binaraga
4	1	01	19	05	0005	PBJT-Pameran
4	1	01	19	05	0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
4	1	01	19	05	0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
4	1	01	19	05	0008	PBJT-Permainan Ketangkasan
4	1	01	19	05	0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
4	1	01	19	05	0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
4	1	01	19	05	0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
4	1	01	19	05	0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
4	1	01	20			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	01	20	01		Opsen PKB
4	1	01	20	01	0001	Opsen PKB
4	1	01	21			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	01	21	01		Opsen BBNKB
4	1	01	21	01	0001	Opsen BBNKB
4	1	02	01	14		Retribusi Pelayanan Kebersihan
4	1	02	01	14	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan
4	1	02	01	14	0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	14	0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
4	1	02	01	15		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	01	15	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	02	12		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
4	1	02	02	12	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
4	1	02	02	13		Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
4	1	02	02	13	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
4	1	02	02	13	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
4	1	02	02	14		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
4	1	02	02	14	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
4	1	02	02	15		Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
4	1	02	02	15	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
4	1	02	02	16		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
4	1	02	02	16	0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
4	1	02	02	17		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
4	1	02	02	17	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
4	1	02	02	18		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
4	1	02	02	18	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
4	1	02	02	19		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
4	1	02	02	19	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
4	1	02	02	20		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
4	1	02	02	20	0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
4	2	01	01	01	0014	DBH Sawit
4	2	01	03	06		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
4	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua
4	2	01	03	07		Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
5	1	01	03	01	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
5	1	01	03	01	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
5	1	01	03	01	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	1	01	03	01	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5	1	01	03	01	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	02	0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
5	1	01	03	02	0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	03	02	0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
5	1	01	03	02	0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
5	1	01	03	02	0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
5	1	01	03	02	0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak
5	1	01	03	02	0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
5	1	01	03	02	0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
5	1	01	03	02	0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
5	1	01	03	02	0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
5	1	01	03	02	0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
5	1	01	05	10	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat
5	1	01	05	10	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
5	1	01	05	10	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	1	01	05	10	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5	1	01	05	10	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
5	1	01	05	11	0034	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan
5	1	01	05	11	0035	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	05	11	0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
5	1	01	05	11	0037	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
5	1	01	05	11	0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
5	1	01	05	11	0039	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak
5	1	01	05	11	0040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
5	1	01	05	11	0041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
5	1	01	05	11	0042	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
5	1	01	05	11	0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
5	1	01	05	11	0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
5	1	02	02	13	0017	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat
5	1	02	02	13	0018	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
5	1	02	02	13	0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	1	02	02	13	0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5	1	02	02	13	0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	14	0034	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	14	0035	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
5	1	02	02	14	0036	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
5	1	02	02	14	0037	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
5	1	02	02	14	0038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
5	1	02	02	14	0039	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
5	1	02	02	14	0040	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
5	1	02	02	14	0041	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
5	1	02	02	14	0042	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
5	1	02	02	14	0043	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
5	1	02	02	14	0044	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah



Menteri Dalam Negeri

Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev